

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi global saat ini semakin tak menentu dan persaingan di dunia usaha pun semakin banyak. Dalam dunia usaha yang semakin berkembang dan luas perusahaan harus dapat menghadapi persaingan antar perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan semakin berkembangnya perusahaan juga diperlukan manajemen yang baik dan teratur, tentunya dengan manajemen yang baik dan teratur tujuan perusahaan akan dapat dicapai. Dalam hal ini tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Laba berhubungan dengan pendapatan dan biaya perusahaan. Untuk memperoleh laba jumlah pendapatan harus lebih besar dari jumlah biaya perusahaan. Akuntansi atas pendapatan merupakan salah satu bagian dari akuntansi keuangan yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak dalam suatu perusahaan. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Kesalahan dalam pengakuan dan pencatatan akan berpengaruh dalam laporan keuangan. Akibatnya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang tepat sehingga dapat merugikan para pemakainya. Bagi perusahaan hal itu juga akan mengakibatkan keputusan yang diambil kurang tepat. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Maka dari itu, peranan perusahaan konstruksi (Jasa Konstruksi), baik yang diusahakan oleh pemerintah melalui BUMN maupun yang dilaksanakan oleh pihak Swasta, sangat besar dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Kesuksesan suatu perusahaan hanya mampu dicapai dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang mampu mempertahankan kontinuitas perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan pada umumnya.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Slamet, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983, pengertian lain adalah perusahaan yang pekerjaannya melaksanakan pembangunan, pembuatan, perbaikan, atau pemugaran pembangunan atau barang tidak bergerak lainnya, baik atas kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

Jasa konstruksi memiliki peran juga dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia maka, kita juga perlu mencermati penerapan Akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak. Dampak dan manfaatnya dapat dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak maupun dari sisi Negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak (Andika, 2015). Namun bagi sekalian orang beranggapan sekalipun, pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan Negara, dan bagi Negara semakin besar pajak akan semakin baik keuangan Negara, namun bagi wajib pajak pembayaran pajak merupakan beban (Londorang, 2014).

Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berbeda di dalam jangkauan pemerintah. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial.

Elemen dalam laporan keuangan yang bersifat material adalah pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 dikatakan bahwa, “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode tertentu bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Penerapan metode pengakuan pendapatan mempunyai pengaruh dalam perhitungan rugi dan laba perusahaan. Apabila penerapan metode pengakuan pendapatan tidak tepat maka akan menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kinerja dan performance perusahaan.

Pada dasarnya, ada dua metode yang dapat diterapkan sebagai acuan pencatatan keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi yang bersifat jangka panjang, *percentage of completion method* dan *cost recovery method*. Adapun dalam proses pengakuan pendapatan dan biayanya, terdapat beberapa pendekatan. Penerapan pencatatan dengan pendekatan pendapatan lebih tepat bagi perusahaan konstruksi kebanyakan. Tetapi hal tersebut menjadi jauh lebih sulit diterapkan

pada perusahaan konstruksi berbasis EPC (*Engineering, Procurement, Construction*), dikarenakan antara industri kontraktor EPC dengan *civil engineering* sangatlah berbeda dalam prosedur pelaksanaan kerja serta ruang lingkup pekerjaannya itu sendiri. Maka timbulah adanya sebuah perbedaan dalam hal pencatatan pengakuannya, dan juga perlulah diketahui lebih lanjut mengenai dampak dari perbedaan pendekatan pengakuan tersebut kepada proses pencatatan.

Adanya perbedaan tersebut pada dasarnya adalah kebebasan perusahaan dalam menentukan 'kacamata' pencatatan. Namun kembali lagi terhadap metode mana yang lebih mudah dan efisien dalam menyajikan laporan keuangan pada kontrak proyek jangka panjang ini sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Maka perlulah diketahui lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas yang juga mengawali penulis dalam melakukan penelitian ini untuk lebih dalam membahas mengenai bagaimana sebenarnya proses pengakuan yang diterapkan oleh PT. Sinar Cakra Abadi ini, dari sebuah perusahaan industri konstruksi yang khususnya bergerak dalam bidang konstruksi *Engineering* (Rekayasa), *Procurement* (Pengadaan), and *Construction* (Konstruksi).

Melihat dari kompleksnya permasalahan dalam akuntansi konstruksi ini, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membuat standar akuntansi sebagai pedomannya bagi perusahaan kontraktor dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan No. 34. Dengan adanya standar akuntansi ini, diharapkan akan memudahkan bagi perusahaan kontraktor sebagai panduan dan acuan dalam menyusun laporan keuangannya. Dalam Pernyataan di atas, dipaparkan juga bahwa kontrak konstruksi jangka panjang itu meliputi:

- a) Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset.
- b) Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Ketepatan perlakuan akuntansi dalam mengakui pendapatan dan beban sangat berpengaruh terhadap kewajaran yang dihasilkan dalam laporan laba rugi periodik. Laporan laba rugi secara periodik menyajikan besarnya pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya yang diakui dalam satu periode. Pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya dalam satu periode tergambar dalam prinsip penandingan (*matching principle*). Dalam prinsip penandingan (*matching principle*), penentuan pendapatan dalam suatu periode harus dikaitkan dengan pembebanan biaya-biaya yang terjadi dalam periode yang sama pula.

Metode Pengakuan Pendapatan dalam perusahaan konstruksi sesuai PSAK No. 34 (Revisi 2010) adalah metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan dalam tiap periode. Pada metode persentase penyelesaian terdapat dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan kemajuan fisik dan (2) pendekatan cost to cost. Dua pendekatan ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengakui pendapatan, sehingga nilai pendapatan dan laba yang diakui juga berbeda.

Metode pendekatan fisik mengakui pendapatan berdasarkan besarnya persentase penyelesaian atas pelaksanaan kontrak jangka panjang berdasarkan kemajuan fisik yang sudah dicapai atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan

metode pendekatan cost to cost mengakui pendapatan berdasarkan besarnya persentase penyelesaian yang didasarkan pada ukuran masukan (input measures), yaitu besarnya usaha-usaha dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau dicurahkan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu kontrak.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan sebuah pernyataan dalam PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak kontruksi. Dan hampir semua perhitungan lama komersial yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem dan maupun penerapan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya secara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar Pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak (PKP).

Dengan adanya perbedaan pendekatan dalam metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian, maka PT Sinar Cakra Abadi dihadapkan pada permasalahan bagaimana menentukan pengakuan pendapatan yang tepat,

terutama pada proyek–proyek jangka panjang. Sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan kinerja perusahaan pada periode tersebut.

Hal-hal yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tersebut adalah agar dapat membandingkan apakah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK No.34 (Revisi 2010), kemudian membandingkan kembali dengan metode pendekatan biaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.34 (REVISI 2010) ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PT SINAR CAKRA ABADI ”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan maka diketahui beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Sinar Cakra Abadi yaitu:

- a. Perusahaan kesulitan menentukan metode penetapan pengakuan pendapatan perusahaan terutama untuk proyek jangka panjang sehingga terjadi ketidaksesuaian pelaporan
- b. Perusahaan saat ini belum menerapkan metode pendekatan fisik sesuai PSAK No. 34
- c. Perusahaan belum pernah melakukan perbandingan antara metode persentase penyelesaian menggunakan pendekatan fisik dan pendekatan biaya (*cost-to-cost*)

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu proyek jangka panjang yang telah selesai dilakukan pada tahun 2016.

Penelitian ini hanya akan membahas perbandingan metode persentase penyelesaian menggunakan pendekatan fisik dan pendekatan biaya (*cost-to-cost*)

1.4 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana metode pengakuan pendapatan pada PT Sinar Cakra Abadi ?
- b. Apakah metode pengakuan ini telah sesuai dengan PSAK No 34?
- c. Bagaimanakah bentuk pengakuan PT Sinar Cakra Abadi yang sesuai dengan aturan PSAK No 34?
- d. Metode pendekatan yang manakah yang seharusnya disesuaikan bagi PT Sinar Cakra Abadi ?
- e. Bagaimana Pengaruh Pajak terhadap metode pendekatan yang digunakan oleh PT Sinar Cakra Abadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode pengakuan pendapat pada PT Sinar Cakra Abadi
- b. Untuk mengetahui apakah metode pengakuan ini telah sesuai dengan PSAK

- c. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengakuan PT Sinar Cakra Abadi yang sesuai dengan aturan PSAK
- d. Untuk mengetahui metode pendekatan yang manakah yang seharusnya disesuaikan bagi PT Sinar Cakra Abadi
- e. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap metode pendekatan yang digunakan oleh PT Sinar Cakra Abadi

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk mengevaluasi penerapan metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang mekanisme pencatatan pada perusahaan konstruksi. Penulis juga mengharapkan pemahaman yang lebih baik mengenai metode pengakuan pendapatan menggunakan persentase penyelesaian menggunakan pendekatan penyelesaian fisik dan pendekatan biaya.

c. Bagi Pembaca

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca mengenai nature of business industri jasa konstruksi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai pengakuan pendapatan jasa konstruksi.